MUKADIMAH
Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
e-Journal: http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd | e-mail: mukadimah@fkip.uisu.ac.id
ISSN: 2622-1373 (Online)
ISSN: 2614-1159 (Print)
Volume 5 | Issue 2
August 2021

# PARADIGMA GENDER DAN MODEL GERAKAN 'AISYIYAH SULAWESI SELATAN PADA MASA ORDE BARU

**Hadisaputra**

Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

***Abstract***

*There are still very few studies on the Aisyiyah Movement in South Sulawesi. Aisyiyah's contribution to South Sulawesi's development has never been publicized. This paper analyzes the 'Aisyiyah movement's role in advancing the social lives of South Sulawesi women during the New Order Era. The historical approach is applied in four stages in this study: heuristics (source collecting), verification (source critique), interpretation, and historiography (historical writing). The research findings indicate that Aisyiyah's gender paradigm encourages its members to engage in activities other than household work. Women are encouraged to take an active role in society and preach in the same way that men do. This shift in perspective began to be implemented in order to give women with equal rights, duties, and positions. 'Aisyiyah never took a frontal position with the government during the New Order. To continue her da'wah agenda, mainly in the areas of education, social and health, Aisyiyah prefers to adopt a conformist-adaptive strategy.*

*Keywords: Gender paradigm; movement models; New Order; 'Aisyiyah of South Sulawesi.*

**Abstrak**

Studi Gerakan Aisyiyah di Sulawesi Selatan masih sangat terbatas. Kontribusi Aisyiyah dalam pembangunan di Sulawesi Selatan selama ini belum pernah ditulis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis paradigma gender 'Aisyiyah selama Orde Baru, dan mengurai model gerakan 'Aisyiyah dalam memajukan kehidupan sosial perempuan Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Temuan penelitian menunjukkan bahwa paradigma gender yang dianut 'Aisyiyah berkontribusi mendorong para anggotanya untuk tidak hanya berkutat pada sektor domestik. Para perempuan didorong untuk aktif keluar dan berdakwah sebagaimana laki-laki. Perubahan pandangan itu mulai diamalkan untuk memberikan hak, kewajiban, dan peran yang sama. Selama Orde Baru, 'Aisyiyah tidak pernah mengambil posisi frontal dengan pemerintah. 'Aisyiyah lebih memilih menjalankan strategi konformis-adaptif, agar bisa terus menjalankan agenda dakwahnya, khususnya di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Kata Kunci: Paradigma gender; model gerakan; Orde Baru; 'Aisyiyah Sulawesi Selatan.

## PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20, pergerakan kaum perempuan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kesadaran nasionalisme. Lahirnya organisasi Putri Mardika yang merupakan sayap perempuan Budi Utomo diduga merupakan sumber inspirasi bagi Ahmad Dahlan dalam mendirikan 'Aisyiyah tahun 1917. Kemungkinan lainnya Kiai Dahlan belajar dari pengalamannya bersama istri Walidah dalam mendidik kaum perempuan melalui *Sopo Tresno* di Kauman Yogyakarta sejak 1914 (Rof'ah, 2016, p. 28).

Menurut Nur'aini, kiprah publik 'Aisyiyah selama ini tidak terlepas dari corak pemikiran sejumlah tokoh awal pelopor gerakan perempuan ini. Para tokoh awal 'Aisyiyah antara lain Siti Bariyah, Siti Dalalah, Siti Dawimah, Siti Wadingah, Siti Badilah dan Siti Busyro (Darban, 2000; Nur'aini, 2013). Pemikiran para tokoh tersebut berlandaskan pada spirit Islam sebagai agama yang berkemajuan, agama dengan ajaran yang membebaskan, mencerahkan dan memajukan. Pandangan

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-07-23 | Revised: 2021-07-23 | Accepted: 2021-08-03 | Published: 2021-08-05
HOW TO CITE (APA 6th Edition):
Hadisaputra. (2021). Paradigma Gender dan Model Gerakan 'Aisyiyah Sulawesi Selatan pada Masa Orde Baru. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. *5*(2), 191-200.
*CORRESPONDANCE AUTHOR: hadisaputra@unismuh.ac.id | DOI: https://doi.org/10.30743/mukadimah.v5i2.4008
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (http://creativecommons.org/license/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

keagamaan itu sangat menentukan sejauh mana model gerakan yang dipilih 'Aisyiyah. Organisasi perempuan ini telah mendorong perempuan agar dapat mengambil peran dalam masyarakat serta mendobrak tradisi yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk maju (Adawiyah, 2015).

Sejak berdiri, 'Aisyiyah telah bergerak pada empat bidang garapan utama, yakni bidang keagamaan, pendidikan, sosial-kemasyarakatan, dan pemajuan martabat kaum perempuan (Nur'aini, 2013). Melalui bidang garapan itu, 'Aisyiyah senantiasa aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat, serta tanggap merespons tuntutan dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks nasional, 'Aisyiyah terlibat sebagai inisiator pelaksanaan Kongres Wanita Indonesia Pertama, 28 Desember 1928 (Seniwati & Lestari, 2019). Dalam Kongres tersebut, selain berperan sebagai salah satu organisasi inisiator kegiatan, 'Aisyiyah juga memberikan sejumlah pandangan seputar perkawinan, talak, maupun pendidikan bagi kaum perempuan (Karomatika, 2018).

Meski awalnya hanya berkiprah di Yogyakarta, dalam waktu singkat, 'Aisyiyah berhasil mengembangkan sayap organisasinya hingga ke luar Jawa, termasuk ke Sulawesi Selatan. 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan diawali dengan berdirinya 'Aisyiyah Cabang Makassar yang dirintis oleh Hj. Fatimah Abdullah (Istri KH. Abdullah, Ketua Muhammadiyah Cabang Makassar saat itu), sekitar tahun 1927. Status 'Aisyiyah kemudian meningkat menjadi Daerah pada tahun 1937. Pada tahun 1940, diadakan Konferensi Muhammadiyah Sulsel yang dirangkaikan dengan Konferensi 'Aisyiyah, di Sengkang, Kabupaten Wajo. Konferensi tersebut memutuskan bahwa Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Sulawesi Selatan adalah St. Dawiah S.S. Djam'an (Azis, 2016).

Studi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, studi seputar konsep dan paradigma gender maupun dalam kaitannya dengan Islam di antaranya: Inayah Rohmaniyah (Rohmaniyah, 2009) dan Fakih (Fakih, 2010). Studi tersebut memberikan bingkai teoretis dalam studi ini. Kedua, studi yang terkait dengan dinamika pandangan gender di Sulawesi Selatan di antaranya Nurul Ilmi Idrus (Idrus, 2005) dan Andi Ima Kesuma dan Irwan (Kesuma & Irwan, 2019). Kajian-kajian ini dijadikan pijakan konteks dalam membaca pergulatan gerakan 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan. Ketiga, studi seputar kiprah gerakan 'Aisyiyah di antaranya Siti Ruhaini Dzuhayatin (Dzuhayatin, 2015), Rabi'atul Adawiyah (Adawiyah, 2015) dan Rof'ah (Rof'ah, 2016). Apalagi kajian tentang kiprah 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan masih sangat terbatas. Ulasan sejarah 'Aisyiyah hanya ditemukan dalam uraian singkat *Profil Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan* (Azis, 2016). Studi biografi juga pernah dilakukan terhadap salah satu aktivis 'Aisyiyah bernama Athirah Kalla, yaitu ibunda Jusuf Kalla (Tetteng, 2008).

Kajian ini menggabungkan ketiga jenis kategorisasi tersebut dalam menyorot paradigma gender dan model gerakan 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan, khususnya dalam *setting* waktu masa lampau, yakni pada era Orde Baru (1966-1998).

## METODE

Kajian ini menerapkan metode penelitian sejarah melalui empat tahap. Pertama, tahap heuristik atau penelusuran sumber dengan mencari arsip tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan gerakan 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan. Kedua, tahap verifikasi yaitu kritik terhadap sumber secara internal maupun eksternal. Ketiga, yaitu interpretasi atau penafsiran yang merupakan analisis fakta yang diperoleh setelah melewati tahap kritik atau uji otentisitas. Keempat, tahap historiografi atau tahap penulisan sejarah (Abdurrahman, 1999, p. 43).

Dalam tahap heuristik, sumber diperoleh berupa dokumen/arsip, majalah, surat kabar, buku-buku, ataupun internet, yang memiliki kaitan dengan topik riset, dikaji lebih lanjut. Observasi lapangan juga dilakukan di Badan Arsip Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan, Makassar. Tahap verifikasi dilakukan dengan cara mengritik otentisitas

dan kredibilitas sumber kritik eksternal maupun internal atas sumber tersebut. Tahap interpretasi dilakukan dengan cara memberi penjelasan terhadap fakta sejarah berdasarkan perspektif peneliti. Tahap historiografi dilakukan dengan cara menulis laporan riset dalam sebuah deskripsi historis dan mengurai fakta dan makna secara kronologis dan sistematis menjadi kisah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Paradigma Gender 'Aisyiyah

Terma gender dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris yaitu *gender*. Istilah gender belum bisa dibedakan secara tegas dengan seks. Masih banyak orang yang memersepsikan gender sama dengan seks, padahal kedua istilah itu berbeda (Rohmaniyah, 2009). Kata seks merupakan pembagian jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Tiap jenis kelamin memiliki ciri fisik yang melekat dan tidak dapat dipertukarkan. Ketentuan itu dianggap ketentuan atau kodrat dari Tuhan. Berbeda dengan gender, yang merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial. Dengan kata lain, gender merupakan perbedaan yang bersumber pada proses sosial dan budaya, bukan berdasarkan ciri biologis. Gender dapat berubah bergantung konteks ruang dan waktu, sedangkan jenis kelamin (seks) relatif tetap (Fakih, 2010).

Ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat selama ini termanifestasi dalam beberapa bentuk. Pertama, pemiskinan (marginalisasi) perempuan, marginalisasi pada ranah ekonomi ini terjadi dalam keluarga, lingkungan kerja, masyarakat bahkan kebijakan negara. Sebagai contoh, ada pekerjaan yang dianggap identik sebagai pekerjaan perempuan, seperti asisten rumah tangga, sekretaris, guru TK (Taman Kanak–Kanak), atau perawat. Pekerjaan tersebut, dipandang lebih rendah dari pekerjaan yang banyak dilakoni kaum laki-laki, yang berdampak pada gaji atau penghasilan. Hal itulah disebut pemiskinan (marginalisasi) perempuan. Kedua, subordinasi atau penomorduaan perempuan. Subordinasi berangkat dari keyakinan bahwa jenis kelamin laki-laki dianggap lebih utama daripada jenis kelamin perempuan. Cara pandang tersebut memosisikan kedudukan serta peran kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki. Misalnya hak untuk mengakses pendidikan, kaum laki-laki biasanya mendapatkan akses lebih besar dari kaum perempuan. Ketiga, stereotip atau pelabelan citra negatif. Salah satu penyebab ketidakadilan gender adalah stereotip yang berasal pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam pelaksanaan pekerjaan kerumahtanggaan (domestik), misalnya, perempuan diberi label ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki, mendapatkan label sebagai tulang punggung utama keluarga dalam mencari nafkah. Implikasinya, apapun yang diperoleh perempuan saat bekerja di ruang publik, hanya bersifat tambahan, atau sekadar dipandang sebagai perpanjangan dari 'kewajiban' domestiknya. Keempat, kekerasan (*violence*), merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun mental seseorang. Wujud kekerasan tersebut, mencakup kekerasan fisik seperti pemukulan, pelecehan, maupun penciptaan ketergantungan. Kelima, yaitu beban ganda, yaitu beban yang mesti ditanggung perempuan secara berlebihan. Perempuan yang bekerja di sektor publik saat pulang ke rumah masih dipandang wajib mengerjakan pekerjaan rumah tangga (Fakih, 2010). Dari kelima bentuk ketidakadilan gender tersebut, 'Aisyiyah cukup konsen untuk menghadapi ketidakadilan pertama hingga keempat. Namun pada wujud ketidakadilan 'beban ganda', menurut Dzuhayatin (2015), tampaknya 'Aisyiyah belum mengambil sikap tegas, bahkan cenderung 'mendiamkan'.

Rohmaniyah secara spesifik mengkaji ketidakadilan gender yang mendapatkan legistimasi dari penafsiran agama. Menurutnya, perbedaan gender telah melewati sejarah panjang, mulai dari pembentukan, pelanggengan, bahkan memeroleh legitimasi budaya, politik hingga teologis. Hal tersebut kerap diterima begitu saja, bahkan diyakini sebagai kodrat atau takdir, sebagaimana penerimaan terhadap seks (jenis kelamin). Perbedaan gender melahirkan ideologi gender yang memosisikan kedudukan laki-laki lebih unggul atas perempuan. Ideologi gender dan paham agama kemudian saling memengaruhi, di mana ideologi gender memengaruhi penafsiran agama, demikian

pula sebaliknya ketidakadilan gender memperoleh stempel legitimasi dari penafsiran keagamaan. Dalam konteks penafsiran keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan stereotip terhadap kaum perempuan, 'Aisyiyah-Muhammadiyah telah menawarkan cara pandang yang cukup progresif (Rohmaniyah, 2009).

Dalam mengkaji gerakan perempuan seperti 'Aisyiyah, menelisik paradigma gender gerakan tersebut merupakan hal yang mesti dilakukan peneliti. Berbagai kiprah yang dilakukan 'Aisyiyah, tentu tidak bisa dilepaskan dari cara pandang gender yang dianutnya. Cara pandang tersebut dapat ditelusuri pada buku yang kerap dijadikan rujukan bagi pimpinan maupun warga organisasi 'Aisyiyah. Setidaknya ada dua buku yang diterbitkan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terkait dengan paradigma gender tersebut: *Adabul Mar'ah fil Islam* dan *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Dzuhayatin, 2015).

Meskipun *Adabul Mar'ah fil Islam* merupakan hasil rumusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, namun sebagai organisasi otonom 'Aisyiyah juga memedomani buku tersebut. Buku ini diterbitkan bersamaan dengan genderang modernisasi yang ditabuh pemerintahan Soeharto. Pada masa itu terjadi peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan, termasuk keterlibatan kaum perempuan. Apalagi pada tahun 1975, PBB juga mendeklarasikan pentingnya melibatkan perempuan dalam pembangunan, khususnya di negara-negara dunia ketiga.

Dalam penilaian Dzuhayatin, *Adabul Mar'ah fil Islam* ditulis secara kurang sistematis. Pada Bab 1, diulas secara normatif seputar pergaulan dalam rumah tangga. Bagian tersebut banyak disadur dari *Tuntunan Mencapai Istri Islam yang Berarti*. Buku itu diterbitkan 'Aisyiyah pada tahun 1934. Dari aspek pergaulan sosial, diuraikan tentang adab pergaulan di sekolah, serta kajian akhlak dalam tinjauan Islam. Dalam Bab 2 hingga 9 disajikan secara tematik, misalnya adab berpakaian perspektif Islam, atau pandangan seputar keterlibatan perempuan pawai dan demonstrasi. Ada pula pembahasan seputar relasi perempuan dengan kesenian, ilmu pengetahuan, jihad, hingga kaitan perempuan dengan politik. Topik-topik itu adalah kumpulan rubrik Majelis Tarjih yang pernah dipublikasikan dalam majalah *Suara Muhammadiyah* periode 1929-1974 (Dzuhayatin, 2015).

Terkait dengan masalah pergaulan dalam rumah tangga, menurut Dzuhayatin buku tersebut masih berpandangan konvensional karena lebih menekankan pada kewajiban istri untuk senantiasa hormat dan patuh terhadap suami, tetapi tidak menekankan hal sebaliknya di mana suami juga mesti menghargai dan menghormati istri. Para istri juga ditekankan untuk berbakti kepada mertua, bahkan melebihi baktinya terhadap suami. Jika ditilik dari segi pergaulan masyarakat, buku tersebut menekankan keseimbangan peran laki-laki dan kaum perempuan. Meski demikian, terdapat penekanan khusus keharusan menutup aurat bagi perempuan dalam berbusana. Tetapi, kaum perempuan tetap diizinkan mengikuti tren mode maupun model busana terbaru. Perempuan juga dianjurkan tidak berhias, memakai perhiasan ataupun parfum yang berlebihan, karena dianggap dapat menjadi penyebab fitnah (Dzuhayatin, 2015).

Pada Bab 10, menyajikan pandangan positif seputar keterkaitan perempuan dengan ilmu pengetahuan, yaitu adanya kesetaraan kewajiban perempuan dengan laki-laki dalam menuntut ilmu ataupun berjihad dalam kebaikan. Kesetaraan pun bisa dilihat dalam menjalankan peran sebagai khalifah di atas muka bumi, yang bukan hanya tanggung jawab laki-laki, melainkan juga kaum perempuan. Perempuan juga memiliki ruang yang sama dalam berjihad, dalam bentuk dakwah dan tablig untuk membela kepentingan agama dengan pikiran, tenaga, maupun harta-benda. Pandangan ini dianggap cukup berkemajuan, seperti kebolehan perempuan bekerja di sektor publik, atau di luar rumah. Dalam kajian tersebut, perempuan dapat bekerja sebagai menteri, bupati, walikota, camat, hingga lurah. Demikian pula profesi seperti direktur dan hakim. Kebolehan tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga berperan sebagai khalifah di atas muka bumi.

Menurut Dzuhayatin, paradigma gender dalam buku *Adabul Mar'ah fil Islam* ini, memiliki pandangan yang berbeda dengan kitab fikih klasik. Perbedaannya, antara lain, fikih klasik melarang perempuan diangkat sebagai pemimpin dengan dalih Surah An-Nisa ayat 34. Namun Majelis Tarjih PP Muhammadiyah memaknai *Qowwamuna,* bukan dengan pengertian bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, tetapi lebih menekankan makna, laki-laki merupakan penegak dan penanggung jawab urusan yang berhubungan dengan kaum perempuan. Pandangan teologis lainnya, kerap mengutip hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Bakrah, "tidak akan beruntung golongan orang yang menyerahkan kekuasaan pada seorang perempuan". Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, hadits itu merupakan ungkapan sementara, atau dikategorikan hadits kondisional pada masa itu (Dzuhayatin, 2015).

Meski buku *Adabul Mar'ah fil Islam* bertujuan menyempurnakan buku *Tuntunan Mencapai Istri Islam yang Berarti*, namun paradigma gender yang dianut masih bersifat konvensional, atau belum berorientasi pada terwujudnya kesetaraan gender. Meski pandangan itu telah memberi ruang bagi perempuan untuk menekuni profesi di ruang publik, namun sekadar perluasan peran sosial dan ekonomis kaum perempuan pada masa lampau. Perluasan peran tersebut, menurut Dzuhayatin, tidak mengubah status perempuan, yang masih dalam pola relasi 'senior-junior'. Peningkatan partisipasi publik kaum perempuan belum tentu secara otomatis berkorelasi dengan peningkatan status sosialnya. Pola relasi pada ranah domestik belum banyak berubah, kaum perempuan mesti menanggung beban ganda. Mereka diberi akses di ruang publik, namun pada ruang domestik, tanggung jawab tetap berada di pundak perempuan (Dzuhayatin, 2015).

Buku kedua yang juga mempengaruhi paradigma gender 'Aisyiyah pada Era Soeharto yaitu *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (1989). Meski terbit belakangan, dalam pandangan Dzuhayatin buku tersebut malah lebih berpandangan konservatif dari buku terdahulu. Indikator yang pertama, terdapat kecenderungan menggeser peran kaum perempuan dari sektor publik ke sektor privat atau domestik. Padahal, *Adabul Mar'ah fil Islam* lebih banyak menekankan pentingnya peran publik perempuan daripada menempatkannya pada ranah domestifikasi (Dzuhayatin, 2015).

Buku *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* dianggap tidak berupaya menuntaskan persoalan beban ganda yang dihadapi kaum perempuan, atau mendorong pola hubungan suami-istri berwajah kemitraan. Dzuhayatin berpendapat bahwa buku ini merupakan justifikasi teologis dari ideologi gender Orde Baru dengan panca tugas wanita dalam GBHN tahun 1984 yang menggambarkan perempuan sebagai: a) pendamping suami yang setia; b) pendidik generasi penerus bangsa; c) pelaksana tugas-tugas rumah tangga; d) pencari nafkah tambahan; e) anggota masyarakat (Dzuhayatin, 2015).

Kedua buku tersebut diedarkan melalui jejaring organisasi 'Aisyiyah di seluruh Indonesia. Dapat diduga, bahwa buku tersebut mempengaruhi corak berpikir para aktivis 'Aisyiyah di nusantara, dan tentu saja memengaruhi Model Gerakan yang dijalankan 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, kajian seputar relasi gender pun telah dikaji. Misalnya, studi Kesuma dan Irwan yang meneliti peran, status, dan fungsi perempuan dalam pandangan kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar, khususnya yang tertuang dalam naskah lontara maupun dalam *pappaseng*. Temuannya menunjukkan bahwa sepanjang sejarah pandangan masyarakat Bugis-Makassar selalu beriringan dengan spirit zaman. Bahkan sejak abad ke-18 status dan kedudukan kaum perempuan sudah sangat tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Namun kedudukan istimewa bagi perempuan, memang lebih banyak dikhususkan untuk kalangan perempuan bangsawan (Kesuma & Irwan, 2019). Dalam kajian sejarah 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan, belum ditemukan data latar belakang kebangsawanan para pengurus 'Aisyiyah di daerah ini, yang kemudian berimplikasi terhadap keterlibatan kaum perempuan ini dalam kegiatan di ruang publik.

Idrus juga mengkaji gender dalam konteks kebudayaan Bugis. Dalam kajiannya, gender dan seksualitas dalam masyarakat Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh norma adat yang bersumber tradisi tulisan, maupun lisan, seperti pepatah ataupun nasihat. Dalam masyarakat Bugis, seorang perempuan mesti selalu dalam perlindungan seseorang. Jika masih lajang, berapa pun usianya, ia berada dalam perlindungan orangtuanya, saudara laki-laki, dan/atau kerabat laki-laki lainnya. Kalau sudah menikah, maka sang perempuan berada di bawah perlindungan suaminya (Idrus, 2005). Dalam konteks penelitian ini, sebagian besar Pimpinan 'Aisyiyah memiliki suami yang juga merupakan aktivis Muhammadiyah. Ketua 'Aisyiyah Sulsel pertama Fatimah Abdullah, merupakan istri dari Ketua Muhammadiyah Sulsel yang pertama pula, K.H. Abdullah. Meski tidak selalu demikian, namun patut diduga keaktifan para kader 'Aisyiyah Sulawesi Selatan dalam berorganisasi, tidak lepas dari persetujuan suami mereka.

Berdasarkan sejumlah ulasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma gender yang dianut oleh Pimpinan 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan cukup progresif. Cara pandang keagamaan 'Aisyiyah berangkat dari posisi kemitraan laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Implikasinya, perempuan juga mesti mendapatkan peran dalam berpartisipasi di sektor publik. Letak kritik yang mungkin disematkan para feminis terhadap 'Aisyiyah, karena masih menoleransi beban ganda. Organisasi perempuan ini memang mendorong perempuan terlibat di ruang publik, namun masih mengikutsertakan kalimat "asal tidak melupakan tanggung jawab di rumah". Paradigma gender 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan juga tidak dapat dipisahkan dari konteks kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar.

**Model Gerakan 'Aisyiyah Sulawesi Selatan**

Paradigma gender yang dibingkai dengan argumen keagamaan, cukup berpengaruh terhadap perkembangan organisasi dan program 'Aisyiyah, termasuk di Sulawesi Selatan. Selama Era Orde Baru, eksistensi 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan sudah cukup menonjol. Pada periode kepemimpinan 1971-1974, organisasi ini telah membentuk 25 Pimpinan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan Pimpinan Cabang terdiri atas 150 Cabang yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Program-program yang dilakukan 'Aisyiyah pada masa tersebut didesain agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional (Idrus, 2005).

Hal itu ditunjukkan dengan berbagai model gerakan sosial yang dijalankan 'Aisyiyah, seperti Amal Usaha Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan. Program 'Aisyiyah lebih banyak berjalan beriringan dengan program-program pemerintah. Meskipun dalam hal pendanaan, program-program 'Aisyiyah lebih banyak menjalankannya secara mandiri. Bahkan banyak persoalan kaum perempuan dalam pembangunan dilakoni 'Aisyiyah lebih serius dari persoalan lain (Rof'ah, 2016).

Kiprah 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan pada masa awal Orde Baru dapat terlihat dari jumlah sekolah yang dimiliki sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Amal Usaha Bidang Pendidikan 'Aisyiyah**

| No | Jenis | Jumlah Sekolah |
|---|---|---|
| 1 | Taman Kanak-Kanak | 75 |
| 2 | Madrasah Ibtidaiyah | 16 |
| 3 | Madrasah Aliyah | 6 |
| 4 | Madrasah Muallimat | 2 |

Sumber: (*Arsip Laporan Pimpinan Aisyiyah Wilayah Sulselra Periode 1971 – 1974*, 1973).

Berdasarkan tabel tersebut, Aisyiyah memberikan kontribusi secara spesifik dalam pendidikan anak usia dini, melalui pembangunan 75 Taman Kanak-Kanak. Pendidikan dasar dan menengah dalam bidang keagamaan pun menjadi lahan garapan organisasi perempuan Muhammadiyah ini.

Selain dalam bidang pendidikan, Aisyiyah di Sulawesi Selatan juga menunjukkan kiprah dalam program bidang Pertolongan. Usaha itu diwujudkan melalui pembentukan amal usaha seperti rumah bersalin, dan panti asuhan. Hingga tahun 1973, Aisyiyah di wilayah tersebut telah memiliki 10 buah rumah bersalin, dan 5 panti asuhan.

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, 'Aisyiyah menunjukkan upaya yang cukup serius. Misalnya, pada tahun 1975, organisasi ini pernah melaksanakan program kursus pendidikan keterampilan yang terdiri dari jahit menjahit, mengetik, dan memasak/tata laksana rumah tangga. Rincian pelaksanaan kursus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Jenis Pendidikan Keterampilan/Kursus Pimpinan 'Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara Tahun 1975**

| No | Macam Kursus | Jurusan | Lama Belajar |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahit-menjahit | Modiste | 3 - 6 Bulan |
| | | Bordir | 3 - 6 Bulan |
| | | Sulam Tangan | 3 - 6 Bulan |
| 2 | Mengetik | Keahlian mengetik 10 jari | 3 - 6 Bulan |
| | | Stenograf dan menggunakan mesin hitung | 3 - 6 Bulan |
| 3 | Memasak/tata laksana rumah tangga | | 3 - 6 Bulan |

Sumber: (*Arsip Pengumuman Pengurus Proyek Keterampilan PAW Sulselra No 005/PKA/3/77 Tanggal 11 Maret 1977*, 1977).

Menurut Wafiah Malik, pengurus 'Aisyiyah Wilayah saat itu, kegiatan tersebut bertujuan mendidik kaum Ibu dan gadis remaja. Bagi kaum ibu, kursus ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bagi remaja putri, khususnya yang putus sekolah, diharapkan dapat menjadi tenaga terampil sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang dapat menjamin masa depan mereka. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti kursus yang digelar 'Aisyiyah saat itu cukup tinggi. Gedung Serbaguna 'Aisyiyah cukup ramai pada jadwal-jadwal kursus yang telah ditentukan (Wawancara dengan Wafiah Malik, 23 September 2020).

Salah satu program 'Aisyiyah yang menopang pembangunan pada era Orde Baru, yaitu program Pembinaan Wanita Desa (PWD). Program tersebut diluncurkan dalam Muktamar Aisyiyah pada tahun 1978. 'Aisyiyah menginisiasi program itu, dengan tujuan untuk menyiapkan informasi dan atau pelatihan kepada kaum perempuan di desa, agar mereka lebih sadar terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai muslimah. Program ini juga bertujuan agar perempuan di desa memahami hak dan tanggungjawabnya dalam keluarga ataupun masyarakat. Tujuan yang tidaklah penting, untuk membekali kaum perempuan di desa dengan berbagai keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga (Kesuma & Irwan, 2019).

Selain memosisikan perempuan di desa sebagai target program, ada pula penekanan pentingnya nilai keluarga serta upaya pemberdayaan ekonomi kaum perempuan. Sekilas, program 'Aisyiyah ini memiliki kesamaan dengan kegiatan PKK. Dalam perkembangannya, Program Pembinaan Wanita Desa yang dikelola 'Aisyiyah, juga dilengkapi dengan sejumlah program pembinaan lainnya. Misalnya pada tahun 1984, 'Aisyiyah juga meluncurkan program untuk mendukung pembangunan desa, yaitu *Qaryah Thayyibah*. Program ini bersifat melengkapi pembinaan wanita desa yang telah berjalan lebih dulu.

*Qaryah Thayyibah* juga beroerientasi membina dan mengembangkan sumber daya alam di desa, demikian pula sumber daya manusianya. Program ini juga menunjukkan imajinasi gerakan 'Aisyiyah untuk terlibat aktif mendukung kesuksesan pembangunan nasional. Program *Qaryah*

*Thayyibah* berupaya membantu pihak desa agar mampu mengembangkan kualitas hidup, dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan maupun peningkatan ekonomi keluarga. Dalam program ini, juga tercakup aktivitas seperti pemberian bantuan modal hutang bagi *home industry*, pemberian beasiswa, serta aktivitas pemberdayaan lainnya. Kader 'Aisyiyah yang terlibat dalam program ini juga ikut mendorong partisipasi warga desa lainnya.

Program *Qaryah Thayyibah* mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 1989, pada salah satu desa kecil di Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar tahun 1990-an, *Qaryah Thayyibah* juga mulai dijalankan di tujuh provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan (*Arsip Laporan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulawesi Selatan Pada Muktamar Ke 42 Tanggal 15-19 Desember 1990 Di Yogyakarta*, 1990). Pada periode 1990-1995, Bagian Tabligh Pimpinan Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan mengupayakan *Qaryah Thayyibah* bagi daerah yang belum ada, dengan melengkapi susunan pengurusnya. Selain itu, 'Aisyiyah juga mengembangkan *Qaryah Thayyibah* bagi daerah yang sudah ada, dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah se-Sulawesi Selatan. Dalam Laporan 'Aisyiyah Sulawesi Selatan 1990-1995, ditemukan catatan bahwa bagian Tabligh Pimpinan 'Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan melaksanakan program penyuluhan pada desa binaan *Qaryah Thayyibah* Bori Masunggu Cabang 'Aisyiyah Labakkang Kabupaten Pangkep. Selanjutnya dilanjutkan dengan kunjungan ke Kabupaten Polmas dalam rangka pemantauan program *Qaryah Thayyibah* dan Pembinaan Wanita Desa (PWD).

Pimpinan 'Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan periode 1978-1981 mulai terlibat dalam Program Pembinaan Wanita Desa. Awalnya mengikuti Lokakarya Pembinaan Wanita Desa di Yogyakarta pada 10-16 Mei 1983. Acara tersebut digelar oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah sebagai program rintisan Pembinaan Wanita Desa pada Luar Jawa, dan Sulawesi Selatan juga ditunjuk melaksanakan program ini. Pimpinan Wilayah Aisyiyah mengutus tiga orang mengikuti kegiatan ini.

Pada tahun 1984, Pimpinan Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan merealisasikan program Pembinaan Wanita Desa dengan menetapkan tiga lokasi pelaksanaan program, yaitu Ujung Pandang, Maros dan Sinjai. Setelah berjalan sejak 15 Agustus 1984, diadakan pemantapan program pada 3 Oktober 1985, berupa penataran guru mengaji dan penanggung jawab PWD di daerah. Meski terkesan sangat mirip dengan program Pemerintah, namun peneliti belum menemukan data bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan Aisyiyah, ataupun Pemerintah memberikan bantuan dana dalam menyukseskan kegiatan 'Aisyiyah tersebut.

'Aisyiyah juga fokus melakukan penguatan aspek keluarga dalam pembinaan kaum perempuan. Apalagi, pada masa Orde Baru, peran keluarga menduduki peran vital dalam pembangunan. Penguatan aspek keluarga ini, dikemas dalam istilah "Keluarga Sakinah". Program tersebut mulai digulirkan dalam perhelatan Muktamar 'Aisyiyah tahun 1985. Keluarga Sakinah memiliki banyak kemiripan dengan program Pembinaan Wanita Desa, karena bertujuan membina lima aspek ideal kehidupan keluarga, yakni agama, kesehatan, pendidikan, serta hubungan ekonomi dan sosial keluarga.

Namun dalam implementasinya, kedua program itu memiliki perbedaan. Program Wanita Desa difokuskan untuk membina masyarakat pedesaan, sedangkan Keluarga Sakinah ditujukan untuk membina masyarakat perkotaan, khususnya kalangan kelas menengah. Menurut Kuntowijoyo, pada waktu beririsan, fokus utama proyek ini sebenarnya merupakan respons terhadap krisis keluarga yang sedang terjadi di wilayah perkotaan. Persoalan utama yang terjadi di kota saat itu, bukanlah sekadar pembangunan fisik, melainkan tergerusnya nilai moral agama.

Di Sulawesi Selatan, program Keluarga Sakinah disosialisasikan melalui Bagian Tabligh Pimpinan 'Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan. Pada periode 1990-1993, Bagian Tabligh 'Aisyiyah Sulawesi Selatan menggelar Pelatihan Muballighat Keluarga Sakinah se-Sulawesi Selatan pada 23-26

September 1993. Kegiatan ini sepertinya merupakan sosialisasi lanjutan dari kegiatan serupa, yang digelar secara regional oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, dalam bentuk Penataran *Muballighat* Keluarga Sakinah Aisyiyah se-Indonesia Timur, 12-13 Juli 1993 di Palu Sulawesi Tengah. Sosialisasi Keluarga Sakinah mungkin dianggap lebih tepat disampaikan para mubalig Aisyiyah, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya melalui mimbar pengajian dan atau forum majelis taklim.

Meski tidak memiliki hubungan formal, sebagian kegiatan Aisyiyah memiliki kemiripan dengan program PKK dan Dharma Wanita. Pola relasi 'Aisyiyah dengan kedua organisasi perempuan "anak emas" Orde Baru tersebut bukan hanya dalam model imitasi program. Dalam Laporan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah saat pelaksanaan Muktamar ke-42, pada tanggal 15-19 Desember 1990 di Kota Yogyakarta, disampaikan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi di Sulawesi Selatan adalah keterlibatan kader-kader 'Aisyiyah yang sudah terlatih lebih senang aktif di Dhama Wanita dan PKK daripada 'Aisyiyah (Arsip Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah, 1990). Dengan kata lain, kehadiran organisasi bentukan Orde baru tersebut juga menyedot sumber daya organisasi perempuan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa eksistensi PKK dan Dharma Wanita bukan sekadar mengintervensi wacana pergerakan kaum perempuan pada masa itu, melainkan

## SIMPULAN

Ternyata salah satu peran signifikan 'Aisyiyah dalam menopang pembangunan para era Orde Baru terletak pada paradigma keagamaan yang berkemajuan, yang mendorong perempuan berkiprah pada ranah publik, bukan sekadar pada arena domestik. 'Aisyiyah mendorong kesadaran bahwa kaum perempuan memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama sebagai khalifah di atas muka bumi. Pandangan Islam berkemajuan tersebut telah memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan kaum perempuan Sulawesi Selatan. Meski di satu sisi, pandangan gender 'Aisyiyah tetap dikritik karena masih melegitimasi 'beban ganda'. Selama era Orde Baru, Gerakan 'Aisyiyah di Sulawesi Selatan juga berperan cukup besar dalam menyukseskan agenda pembangunan pemerintahan Soeharto. 'Aisyiyah tidak pernah mengambil posisi frontal dengan rezim yang berkuasa. 'Aisyiyah, sebagaimana Muhammadiyah, lebih memilih menjalankan strategi konformis-adaptif, agar bisa terus menjalankan agenda dakwahnya, khususnya di bidang tablig, pendidikan, sosial, dan kesehatan, tanpa terlibat terlalu jauh dalam urusan politik kekuasaan.

## REFERENSI


Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Adawiyah, R. (2015). *Peran Sosial Politik Aisyiyah pada Masa Pergerakan Nasional sampai Orde Lama (1917-1965)*. UIN Syarif Hidayatullah.

*Arsip Laporan Pimpinan Aisyiyah Wilayah Sulselra Periode 1971 – 1974*. (1973). Makassar.

*Arsip Laporan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulawesi Selatan pada Muktamar ke 42 tanggal 15-19 Desember 1990 di Yogyakarta*. (1990). Makassar.

*Arsip Pengumuman Pengurus Proyek Keterampilan PAW Sulselra No 005/PKA/3/77 Tanggal 11 Maret 1977*. (1977). Makassar.

Azis, N. (2016, April). Selayang Pandang 'Aisyiyah Sulawesi Selatan.

Darban, A. A. (2000). *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang Press.

Dzuhayatin, S. R. (2015). *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakih, M. (2010). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Idrus, N. I. (2005). Siri', Gender, and Sexuality among the Bugis in South Sulawesi. *Antropologi Indonesia*, *29*(1). https://doi.org/10.7454/ai.v29i1.3527

Karomatika, A. I. (2018). *Kontribusi 'Aisyiyah dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928*. UIN Sunan Kalijaga.

Kesuma, A. I., & Irwan. (2019). Perempuan Bugis: Dinamika Aktualisasi Gender di Sulawesi Selatan. *Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM*. Makassar: Universitas Negeri Makkasar.

Nur'aini, D. S. (2013). CORAK PEMIKIRAN DAN GERAKAN AKTIVIS PEREMPUAN (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah Periode 1917–1945). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *14*(2).

Rof'ah. (2016). *Posisi dan Jati Diri 'Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan 1917-1998*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Press.

Rohmaniyah, I. (2009). Gender dan konstruksi Perempuan dalam Agama. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis, Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, *10*(2).

Seniwati, S., & Lestari, T. D. (2019). SIKAP HIDUP WANITA MUSLIM KAUMAN: KAJIAN PERANAN AISYIYAH DALAM KEBANGKITAN WANITA DI YOGYAKARTA TAHUN 1914-1928. *Walasuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya*, *10*(2), 219–232. https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i2.11

Tetteng, B. (2008). *Hj. Athirah Kalla: melangkah dengan payung*. Yogyakarta: Ombak.

Copyright Holder **©Hadisaputra** | Copyright Year **2021**
Licence URL **https://creativecommons.org/licenses/by/4.0**